

Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2015-2017

Petrus Kakadir¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

I Gusti Ngurah Agung Suaryana²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

Ni Gusti Putu Wirawati⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

Surel : okdangdong@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja rutin dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia di kabupaten/kotaprovisi papua. Penelitian ini mencakup 29 kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada indeks pembangunan manusia. Kegagalan belanja modal berpengaruh pada indeks pembangunan manusia ini terjadi, disamping karena masih rendahnya jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga disebabkan pengalokasian belanja modal yang belum dilaksanakan tepat sasaran.

Kata Kunci: Belanja Rutin; Belanja Modal; Indeks Pembangunan Manusia.

Allocation of Routine Expenditures and Capital Expenditures on the Human Development Index for Fiscal Year 2015-2017

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of routine and capital expenditure allocations on the human development index in the regency/municipality of Papua province. This study covers 29 districts/cities in the province of Papua using an associative quantitative approach. The analysis technique used is multiple linear regression analysis technique. The results of the analysis show that routine expenditures have a positive and significant effect on the human development index, while capital expenditures have a negative and non-significant effect on the human development index. The failure of capital expenditures to affect the human development index occurred, in addition to the low amount of capital expenditure allocated in an effort to improve people's welfare, also due to the allocation of capital expenditures that had not been carried out on target.

Keywords: Routine Shopping; Capital Expenditures; Human Development Index.



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 9
Denpasar, September 2021
Hal. 2195-2212

DOI:
[10.24843/EJA.2021.v31.i09.p04](https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i09.p04)

PENGUTIPAN:

Kakadir, P., Suaryana, I.G.N.A., Putri, I.G.A.M., & Wirawati, N.G.P. (2021). Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2015-2017. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2195-2212

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
4 Juli 2019
Artikel Diterima:
30 Juli 2021

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Adanya kebijakan ini, Membuat tiap-tiap Daerah baik Provinsi, Kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah di pandang lebih demokratis dan mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya masing-masing daerah dapat leluasa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya (Wertianti & Dwirandra, 2013).

Gubernur, Bupati dan Wali kota selaku pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan kota memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Pemerintah daerah di jadikan sebagai titik sentral dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia termasuk salah satunya desentralisasi fiskal. Menurut (Yusuf & Gunanto, 2014) adanya desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Diharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah tidak hanya dapat menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya saja, Melainkan juga dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Provinsi Papua sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia turut merasakan dampak dari diberlakukannya otonomi daerah khususnya dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan APBD pada hakikatnya ditunjuk untuk kepentingan publik. Pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja daerah atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Namun proses penyusunan APBD tidak selamanya berjalan dengan baik. Penyusunan APBD seringkali berbenturan dengan kepentingan politisi antara pihak Eksekutif dan Legislatif. Teori keagenan (*Agency Theory*) menyatakan bahwa, Masyarakat yg diprosikan oleh legislatif berperan sebagai prinsipal (pihak yang melakukan tindakan sesuai dengan wewenang atau kehendak prinsipal). Eksekutif diberikan wewenang oleh legislatif untuk merancang APBD untuk jangka waktu satu tahun dan secara bersama-sama mengesahkannya.

APBD tersusun atas komponen penerimaan daerah dan belanja daerah pengalokasian anggaran belanja ke pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat (Zebua & Adib, 2014). Peraturan pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menjelaskan bahwa belanja adalah seluruh pengeluaran yang di lakukan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat dikelompokan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga, dan transfer. Belanja operasi (belanja rutin) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan

keuangan, sedangkan belanja modal terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainnya.

Menurut Badrudin dalam Zebua & Adib, (2014) menyatakan pemerintah melakukan belanja daerah baik dalam bentuk belanja rutin maupun belanja modal dengan harapan akan terjadi peningkatan aktifitas yang memacu pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai, Namun, dewasa alokasi belanja daerah masih di panjang belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh penurunan alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya terjadinya peningkatan proporsi belanja pegawai yang tidak berpengaruh langsung pada pembangunan daerah.

Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan penambahan dan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) baru daerah setiap tahunnya. Belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang dipandang kurang sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Belanja modal semestinya digunakan untuk pembangunan insfratraktur yang memadai yang justru perlu ditingkatkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Yudhhoyono, 2011) dalam (Zebua & Adib, 2014).

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan mengukur keberhasilan atau kinerja suatu Negara atau wilayah dalam bidang manusia (Artaningtyas et al., 2012). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, indikator ekonomi. Ketiga indikator tersebut dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan nonfisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas nonfisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan yaitu pengeluaran riil per kapita.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM niscaya akan terwujud dengan pengalokasian belanja daerah khususnya belanja rutin dan belanja modal secara tepat. Menurut Sahrah (2007), dalam (Badrudin & Khasanah, 2011) alokasi belanja daerah di bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Anggaran di bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. Anggaran di bidang insfratraktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat di bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil perkapita (Delavallade, 2006).

Penelitian Sasana, (2012) yang mengklasifikasikan belanja daerah menjadi belanja langsung dan tidak langsung menunjukkan hasil bahwa realisasi belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi jawa tengah. Belanja langsung diperuntukkan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat merancang peningkatan produktivitas masyarakat serta pelaku usaha

di daerah. Disamping itu, belanja pemerintah daerah juga diperuntukan bagi layanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang harus diperoleh masyarakat. Tepatnya pengalokasian belanja langsung seperti membenah infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Lebih lanjut menurut Sasana, (2012), pengalokasian belanja tidak, langsung secara tepat akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sumiyati, (2015) dalam penelitian pengaruh belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di provinsi jawa barat menyatakan bahwa belanja modal baik secara persial maupun simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Namun demikian, hasil penelitiannya masih menunjukkan arah yang positif yang berarti bahwa setiap peningkatan indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian (Zebua & Adib, 2014) menunjukkan belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja rutin belum sepenuhnya berkontribusi dalam capaian pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah.

Penelitian-penelitian sebelumnya mencerminkan bahwa struktur belanja APBD dapat dikatakan belum dialokasikan secara tepat dalam upaya peningkatan pembangunan kualitas manusia. Berdasarkan uraian, peneliti merasa perlu untuk mengetahui hubungan antara alokasi belanja rutin dan belanja modal dengan IPM disuatu wilayah. Perbedaan penelitian ini dengan riset-riset sebelumnya adalah menggunakan seluruh komponen dari belanja rutin dan belanja modal agar lebih menggambarkan pengaruh alokasi belanja rutin dan belanja modal secara keseluruhan pada peningkatan IPM. Belanja rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan, sedangkan belanja modal terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten /kota di provinsi papua, sedangkan pada penelitian Sasana, (2012) meneliti pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah dan (Sumiyati, 2015) serta (Zebua & Adib, 2014) meneliti pemerintah kabupaten/kota di jawa barat.

Sasana, (2012), menyatakan bahwa tidak semua daerah dengan jumlah belanja daerah yang tinggi memiliki IPM yang tinggi pula. Tingkat IPM yang tinggi pun belum tentu merupakan kontribusi penuh dari alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pencapaian tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan ekonomi, sosial, budaya masyarakat itu sendiri (Badrudin & Khasanah, 2011). Namun, pengalokasian belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara tepat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh alokasi belanja rutin dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi papua.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk konfirmasi pengaruh positif alokasi belanja rutin dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi papua.

Menurut Jensen & Meckling, (1976) hubungan keagenan dalam teori keagenan didefinisikan sebagai sebuah kontrak antara satu atau lebih (principal) dengan orang lain (agen). Prinsipal dalam hal ini menyewa agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan pada agen. Adanya hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Adanya perbedaan kepentingan ini membuat masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Usulan yang diajukan oleh eksekutif (agen) memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif atau *agency* yang menjadi pengusul anggaran dan juga pelaksana atau pengguna dari anggaran tersebut berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran Smith & Bertozzi, (1998) dalam (Suryarini, 2012). Sementara itu, prinsipal sulit untuk mengawasi dan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh agen karena sedikitnya jumlah informasi yang dimiliki pihak prinsipal.

Kaitan *agency theory* dalam penelitian dapat dilihat hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemberian sumber daya berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya guna meningkatkan pendapatan asli daerah telah diberikan oleh masyarakat (prinsipal) kepada daerah. Selaku agen, pemerintah daerah sudah selayaknya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pengalokasian belanja daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik yang memadai. Dimana pemenuhan kebutuhan publik tersebut didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Bodman et al., (2009) menyatakan secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Faridi, 2011).

Teori *fiscal federalism* dibagi menjadi dua perspektif yakni teori tradisional dan teori perspektif baru. (Hayek, 1945). mengemukakan bahwa teori tradisional menekankan keuntungan alokatif dan desentralisasi. Pandangan ini memiliki dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi. Pertama, tentang penggunaan *knowledge in society* yang menyiratkan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Teori yang kedua dikena sebagai prospektif baru, dikemukakan oleh (Musgrave, 1959) dan (Oates, 1972). Teori ini lebih menekankan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh pada

perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pusat dalam perekonomian daerah dibatasi.

Menurut Mardiasmo, (2009), desentralisasi fiskal menurut tiap-tiap daerah memiliki kemandirian fiskal yang tinggi dengan mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih ada bantuan dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal dikatakan menawarkan sejumlah manfaat bagi tata kelola publik, pertumbuhan, akuntabilitas dan responsivitas para pejabat pemerintah terhadap tuntutan lokal dan kebutuhan (Amagoh & Amin, 2012).

Penerapan sistem pemerintah terdesentralisas, akan membuat pemerintah daerah dikejar untuk meningkatkan usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto & Miranti, 2009). Tirtosuharto, (2010) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan struktur insentif yang lebih besar bagi pemerintah untuk lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya keuangannya, namun itu tidak selalu mengarah pada pertumbuhan yang kuat karena mengingatkannya kesenjangan antara daerah terutama di tingkat kapasitas pembangunan dan sumber daya.

Belanja rutin merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pengeluaran ini tidak menambah aset kekayaan bagi daerah (Baswir, 2000). Belanja rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hiba, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan.

Belanja modal merupakan salah satu komponen dari belanja langsung yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal adalah pengeluarannya yang manfaatnya cenderung melebihi tahun anggaran dan akan menambahkan aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya (Mardiasmo, 2009:67). Belanja Modal dapat dikeompokkan menjadi lima kategori antara lain Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainny. Sedangkan, menurut Halim, (2002:73), Belanja modal dibagi menjadi Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintah (Artaningtyas et al., 2012). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahhub Ul Haq seorang ekonom dari Pakistan yang dibantu oleh Gustav Ranis. Lebih lanjut, (Artaningtyas et al., 2012). menyatakan bahwa IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapat perkapita untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan.

Indeks pembangunan manusia dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan IPM merupakan indikator pembangunan penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari

proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan kesejahteraan. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk. Meskipun menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun saat ini IPM merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Konsep IMP menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu capaian di bidang kesehatan yang diukur dalam indeks harapan hidup. Capaian di bidang pendidikan dengan mengukur rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indeks standar kehidupan yang layak, yang diindikasikan dengan logaritma normal dari produk domestik bruto perkapita penduduk dalam daya beli. Dengan demikian terdapat tiga indeks yang menjadi komponen dalam perhitungan indeks pembangunan manusia yaitu indeks usia harapan hidup (*life expectancy indeks*), indeks pendidikan (*education indeks*), dan indeks pendapat (*income indeks*). Rumus perhitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut.

$$IPM = 1/3 (x_1 + x_2 + x_3) \dots\dots\dots(1)$$

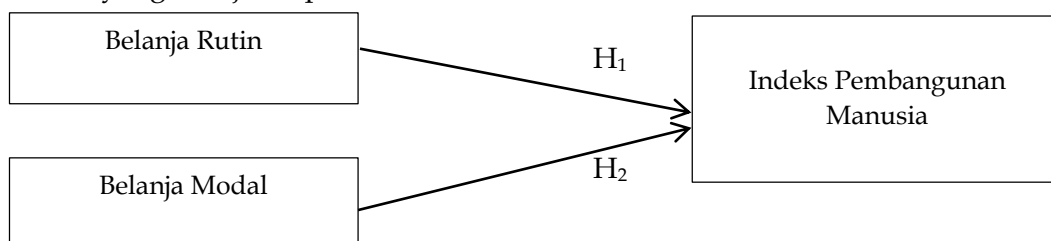
Keterangan :

X1= indeks konsumsi perkapita yang disesuaikan

X2= indeks angka harapan hidup

X3= indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama bersekolah)

Pendapatan kategori IPM di dasarkan pada skala 0,0-1,0 Mudrajad, (2003) dalam (Artaningtyas et al., 2012) terdiri dari kategori rendah, nilai IPM 0-0,5, kategori menengah : nilai IPM antara 0,51-0,79, kategori tinggi, nilai IPM 0,8-1. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang disajikan pada Gambar 1, berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Penelitian, 2019

Belanja rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset kekayaan bagi daerah. Belanja rutin merupakan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum (Setiawan, 2010). Menurut badrudin dalam (Zebua & Adib, 2014), belanja

daerah yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk belanja rutin diharapkan akan meningkatkan aktivitas yang memicu pertumbuhan ekonomi sehingga sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Salah satu jenis belanja rutin yaitu belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Zebua & Adib, 2014). Sasana, (2012) menyatakan bahwa belanja daerah yang mencakup belanja tidak langsung, dimana sebagian besar merupakan komponen belanja rutin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengalokasian belanja rutin secara tepat akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam perjalanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan kualitas manusia (Sasana, 2012).

H₁: Belanja rutin berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi papua.

Belanja modal merupakan salah satu komponen dari belanja langsung yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan investasi. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Zebua & Adib, (2014) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Mirza, 2012). Peningkatan alokasi belanja modal semestinya juga meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM.

H₂: Belanja modal berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota diprovinsi papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian berbentuk asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Rahyuda, 2016:17). Lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah di kabupaten/kota di provinsi papua. Obyek penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten/kota provinsi papua dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota provinsi papua tahun 2015-2017.

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah belanja rutin (X₁) dan belanja modal (X₂). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dengan jalan memberi skor. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dan indeks pembangunan manusia (IPM) seluruh kabupaten/kota di provinsi papua tahun 2010-2013. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil analisis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang terdapat pada biro keuangan provinsi papua berupa laporan realisasi APBD tahun 2010-2013, dan indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2010-2013 yang dikeluarkan badan pusat statistik provinsi papua.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi APBD kabupaten/kota se-provinsi papua dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-provinsi papua periode 2015-2017 dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-provinsi papua periode 2015-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yakni laporan realisasi APBD kabupaten/kota se-provinsi papua dan indeks pembangunan manusia kabupten/kota se-provinsi papua periode 2014-2017 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 1 kota dengan kurun waktu 4 tahun (2014-2017).

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bilah semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015:122). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi nonperilaku berupa studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan meneliti dan memanfaatkan dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain (Rahyuda, 2016:77) seperti dengan mencatat, mengutip serta pengumpulan data dari dokumen yang terdapat pada biro keuangan provinsi papua, badan pusat statistik provinsi papua serta hasil-hasil penelitian dan buku-buku literature untuk menghasilkan argumentasi yang mendukung hasil analisis penelitian.

Teknik ini digunakan untuk melihat pengaruh alokasi belanja rutin dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia (IPM). Tahap analisis yang dilakukan antara lain, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji kesesuaian modal dan uji hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut. Analisis regresi linear berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh alokasi belanja rutin dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota provinsi papua. Model analisis regresi linear berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- α = Bilangan konstan
- $\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi
- Y = Indeks pembangunan
- $X_{1,2}$ = Variabel bebas (belanja rutin, dan belanja modal)
- ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Papua merupakan salah satu destinasi Alam yang indah di Indonesia disebut sebagai surga kecil yang yatu ke bumi. Keramahan penduduk dan kekentalan budaya daerah. Provinsi Papua tidak hanya terdiri atas Pulau Papua saja, tetapi juga terdiri atas Pulau-pulau yang sekitar Pulau Papua. Adapun pulau tersebut antara lain Pulau Biak, Pulau Supyori, Pulau Seruwi, Pulau Tobati. Disamping itu, Papua memiliki pegunungan dengan danau disekitarnya seperti Danau Sentani, Danau Habema, Danau Love, Danau Rombebai, Danau Paniai Telaga Samares, dan Sungai Mamberamo. Provinsi Papua yang dikenal dengan sebutan Irian Jaya berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea, dan

berdekatan dengan benua Australia serta diapit oleh samudra Indonesia dan samudra Pasifik.

Provinsi Papua Wilayahnya paling luas di Indonesia. Luas Provinsi Papua 319.036,04 Km² atau merupakan ± 21 persen dari luas wilayah Indonesia. Lebih dari 75 persen masih tertutup oleh hutan-hutan tropis yang lebat, dengan ± 80 persen penduduknya masih dalam keadaan semi terisolir di daerah pedalaman (bagian tengah Papua). Jumlah penduduk 2,3 Juta Jiwa dengan kepadatan penduduk 5,13 orang per Km². Secara geografis berada diantara garis meridian 0°19' - 10°45' LS dan antara garis bujur 130°45' - 141°48' BT yang membentang dari Barat ke Timur dengan silang 11° atau 1.200 Km.

Tabel 1. Daftar Kabupaten / Kota di Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota	Luas Wilayah
1	Kabupaten Asmat	Agats	31.983,69 km ²
2	Kabupaten Biak Numfor	Biak	2.602,00 km ²
3	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah	27.108,00 km ²
4	Kabupaten Deiyai	Tigi	537,39 km ²
5	Kabupaten Dogiyai	Kigamani	4.237,40 km ²
6	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa	3.922,02 km ²
7	Kabupaten Jayapura	Sentani	11.157,15 km ²
8	Kabupaten Jayawijaya	Wamena	7.030,66 km ²
9	Kabupaten Keerom	Waris	8.390,00 km ²
10	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui	2.050,00 km ²
11	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom	2.248,00 km ²
12	Kabupaten Mamberamo Raya	Burmeso	23.813,90 km ²
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma	1.275,00 km ²
14	Kabupaten Mappi	Kepi	24.118,00 km ²
15	Kabupaten Merauke	Merauke	44.071,00 km ²
16	Kabupaten Mimika	Timika	21.633,00 km ²
17	Kabupaten Nabire	Nabire	11.112,61 km ²
18	Kabupaten Nduga	Kenyam	2.168,00 km ²
19	Kabupaten Paniai	Enarotali	6.525,25 km ²
20	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil	15.682,00 km ²
21	Kabupaten Puncak	Ilaga	8.055,00 km ²
22	Kabupaten Puncak Jaya	Kotamulia	4.989,51 km ²
23	Kabupaten Sarmi	Sarmi	17.742,00 km ²
24	Kabupaten Supiori	Sorendiwari	678,32 km ²
25	Kabupaten Tolikara	Karubaga	5.588,13 km ²
26	Kabupaten Waropen	Botawa	10.977,09 km ²
27	Kabupaten Yahukimo	Sumohai	17.152,00 km ²
28	Kabupaten Yalimo	Elelim	1.253,00 km ²
29	Kota Jayapura	Jayapura	935,92 km ²

Sumber: Data Penelitian, 2019

Di Indonesia, kebijakan otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Penerapan kebijakan ini membuat tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota lebih memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, mampu memberi keleluasaan bagi pemerintah provinsi Papua dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah salah satunya dalam hal melakukan alokasi-alokasi belanja daerah. Pengalokasian

belanja daerah, baik belanja rutin mau pun belanja modal semestinya dialokasikan dengan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pembangunan manusia di Papua terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua mencapai 59,09. Angka ini meningkat sebesar 1,04 Poin dibandingkan tahun 2016. Bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 65,14 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 10,54 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,27 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Papua memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 6.996 juta rupiah per tahun, meningkat 359 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2017. IPM Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi 59,09 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM di provinsi paling timur di Indonesia tumbuh sebesar 1,79 persen di periode 2016-2017 dan menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2017

Komponen	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Umur harapan hidup lahir (UHHL)	Tahun	64,95	65,09	65,12	65,14
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	9,76	9,95	10,23	10,54
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	5,48	5,99	6,15	6,996
Pengeluaran perkapita	Rp 000	6,21	6,469	6,637	6,996
IPM		56,47	57,25	58,09	59,09
Pertumbuhan IPM	persen	0,79	0,89	1,40	1,79

Sumber: Data Penelitian, 2019

Penelitian mencakup 29 Wilayah kabupaten/kota diprovinsi Papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Penelitian ini menggunakan data *time series*, yang yang digunakan selama periode 2015 hingga 2017. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 1 kabupaten/kota x 4 tahun = 4 amatan. Berdasarkan 4 data penelitian, terdapat empat data amatan yang mengalami *outlier*, sehingga jumlah data amatan menjadi 4 amatan. *Outlier* merupakan data yang memiliki karakteristik unik yang mengakibatkan data tersebut terlihat berbeda sangat jauh dari observasi-observasi lainnya sehingga dalam bentuk nilai yang ekstrem baik

dalam bentuk variabel tunggal maupun kombinasi (Ghozali, 2016). Hal ini menyebabkan data *outlier* harus dikeluarkan dari analisis agar tidak memberikan hasil analisis yang menyimpang. Proses indentifikasi *outlier* dilakukan dengan mentransformasi data kebentuk Zscore. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai residual. Hasil pengujian normalitas terhadap 4 amatan disajikan dalam Tabel 3, berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized residual</i>
N	4
<i>Kolmogorov - Smirnov Z</i>	0,545
<i>Asym. Sig. (2-tailed)</i>	0,928

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dalam *One-Simple Kolmogorov-Smirnov Test* adalah sebesar. 0,928 ($> 0,05$), sehingga H_0 diterima. Ini berarti bahwa data yang di uji menyebar normal / terdistribusi normal .

Uji autokorelasi dilakukan untuk melacak adanya korelasi auto atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Hasil pengujian autokorelasi disajikan dalam Tabel 4, berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	<i>Durbin - watson</i>
1	1,909

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, nilai Dw yang di hasilkan adalah sebesar 1,830. Dengan jumlah $n = 4$ diperoleh nilai $du = 1,58$ serta nilai $4-dL$ dan $4-dL$ masing-masing adalah 2,5 dan 2,67, sehingga $dL < DW < du$ ($1,33 < 1,380 < 1,58$).

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi yang dibuat dilihat berdasarkan matriks korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian multikolineartas dapat dilihat pada Tabel 5, berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolineritas

Model	<i>Colinearity</i>	<i>Statistics</i>
	<i>Tolerance</i>	VIF
Ln_ Belanja_ Rutin	0,776	1,289
Ln_ Belanja_ Modal	0,776	1,289

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel Ln belanja rutin adalah 0,776 ($> 0,1$) dan nilai VIF sebesar 1,289 (< 10). Nilai *tolerance* untuk variabel Ln belanja modal adalah 0,776 ($> 0,1$) dan nilai VIF sebesar 1,289 (< 10). Oleh karena variabel belanja rutin dan belanja modal memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinearitas.

Uji hetroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. agar model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas, maka nilai signifikansi variabel bebas terhadap absolut residual harus lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil hasil pengujian disajikan dalam Tabel 6, berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig
1 (Constant)	0,105
Ln_Belanja_Rutin	0,149
Ln_Belanja_Modal	0,082

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai sigifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap nilai *absolute residual* berada diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Sejumlah 4 amatan telah lolos uji asumsi klasik dan diperoleh nilai deskripsi statistik yang memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata-rata dari data penelitian, yang disajikan dalam Tabel 7, berikut ini.

Tabel 7. Hasil Deskriptit Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean
Belanja_rutin	4	863.084.833.792,00	103.367.015.819,0	972.027.118.17
Belanja_modal	4	16.747.445.407,10	261.255.008.105,0	218.365.396.019
IPM	4	56,47	59,09	57,7250
Valid n (listwise)	4			

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 7, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalokasikan belanja rutin tertinggi sebesar Rp 103.367.015.819,00, terendah sebesar Rp 863.084.833.792,0, dengan rata-rata sebesar Rp 972.027.118,17. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi papua mengalokasikan belanja modal tertinggi sebesar Rp.261.255.008.105,0, terendah sebesar Rp 16.747.445.407,10, dengan rata-rata sebesar Rp 218.365.396.019. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi papua mencapai indeks pembangunan manusia tertinggi pada tingkat 59,09 persen, terendah pada tingkat 5647, persen dengan rata-rata pada tingkat 57,7250 persen.

Tabel 8. Hasil Uji Kesesuaian Model (Uji F)

Model	F	Sig.
1 Regresion Residual Total	26,493	0,027

Sumber: Data Penelitian, 2019

Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima dan jika $p\text{-value} > 0,05$, maka hipotesis alternatif ditolak. Berdasar Tabel 8, terlihat bahwa $p\text{-value}$ sebesar 0,027 ($< 0,05$) sehingga hipotesis alternatif diterima. Hipotesis alternatif diterima diterima, artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi

IPM atau dengan kata lain variabel belanja rutin dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu IPM.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R
1	0,404	0,390

Sumber: Data Penelitian, 2019

Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai adjusted R² sebesar 0,390. Hal ini memiliki arti bahwa hanya 39,0 persen perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel belanja rutin dan belanja modal. Sedangkan sisanya 35,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Sedikitnya dipengaruhi belanja rutin dan belanja modal pada IPM kemungkinan juga disebabkan pengalokasian belanja rutin dan belanja modal belum dilakukan secara tepat dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persamaan regresi yang dihasilkan melalui analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$\text{Ln IPM} = 2,050 + 0,125 \text{ Ln belanja rutin} - 0,055 \text{ Ln belanja modal}$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstan 2,050 berarti bahwa apabila alokasi belanja rutin dan belanja modal konstan maka IPM akan meningkat sebesar 2,050 persen. Nilai koefisien regresi belanja rutin sebesar 0,125 memiliki arti apabila alokasi belanja rutin naik sebesar satu persen, maka IPM akan meningkat sebesar 0,125 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi belanja modal sebesar -0,55 memiliki arti apabila alokasi belanja modal naik sebesar satu persen, maka IPM akan menurun sebesar 0,55 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diuji secara individual terhadap IPM (Y) adalah belanja rutin (X₁) dan belanja modal (X₂). Jika *p-value* < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima dan jika *p-value* > 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 10, berikut ini.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis

Model	B	T	Sig.
1 (Constant)	2,050	0,897	0,535
Ln_Belanja_Rutin	0,125	28,177	0,030
Ln_Belanja_Modal	0,055	25,655	0,043

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 10, dapat dijelaskan hasil uji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji pengaruh belanja rutin (X₁) terhadap IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,030. lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini berarti bahwa belanja rutin berpengaruh signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi belanja rutin (X₁) pada Tabel 10, menunjukkan adanya pengaruh positif belanja rutin pada IPM. Hasil ini berarti bahwa belanja rutin berpengaruh positif pada IPM atau dengan kata lain hipotesis H₁ diterima.

Hasil uji pengaruh belanja modal (X₂) terhadap IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,043 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi belanja modal (X₂) pada Tabel 10, menunjukkan adanya pengaruh negatif belanja modal pada IPM. Hasil ini

menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif pada IPM atau dengan kata lain hipotesis H_2 ditolak.

Hasil uji pengaruh belanja rutin (X_1) terhadap IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,030 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa belanja rutin berpengaruh signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi belanja rutin (X_1) pada Tabel 10, menunjukkan adanya pengaruh positif belanja rutin pada IPM. Hal ini berarti bahwa belanja rutin berpengaruh positif pada IPM atau dengan kata lain hipotesis H_{a1} diterima. Pengalokasian belanja rutin pada sektor-sektor pembangunan kualitas manusia secara tepat akan turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS), adanya puskesmas dan jaminan kesehatan Papua (JKMP) maupun pemeliharaan terhadap infrastruktur serta sarana prasarana publik. Alokasi belanja rutin secara tepat juga dapat meningkatkan pelayanan di masing-masing unit kerja dalam pelayanan publik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji pengaruh belanja modal (X_2) terhadap IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,043 lebih besar $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi belanja modal (X_2) pada Tabel 10, menunjukkan adanya pengaruh negatif belanja modal pada IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif pada IPM atau dengan kata lain hipotesis H_{a2} ditolak. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mirza, (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Justru sebaliknya, penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Dewi & Supadmi, 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM. Wahyu & Dwirandra, (2015) juga menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh pada IPM. Kegagalan belanja modal berpengaruh pada IPM ini terjadi, disamping karena masih rendahnya jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dikarenakan pengalokasian belanja modal belum dilaksanakan secara tepat sasaran. Adanya pengalokasian belanja modal pada urusan pemerintah yang tidak terkait dengan masyarakat seperti pengadaan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, dan pembangunan gedung pemerintahan yang berlebihan turut menjadi faktornya. Kegagalan ini juga kemungkinan terjadi karena adanya belanja modal yang terhenti di tengah jalan pengerjaan, tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat (mubasir) atau karena belanja modal yang dilakukan saat ini baru dirasakan manfaatnya beberapa tahun kedepan.

SIMPULAN

Simpulan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Papua. Peningkatan alokasi belanja rutin akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pengalokasian belanja rutin secara tepat dapat berkontribusi dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Papua. Peningkatan belanja modal justru menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indeks

pembangunan manusia. Hal ini terjadi karena masih rendahnya alokasi belanja modal dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengalokasian belanja modal yang belum tepat sasaran.

Berdasarkan simpulan, saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut adalah pemerintah daerah diharapkan memiliki kepastian dan aturan yang jelas tentang besaran alokasi anggaran sektor publik jika masih menginginkan proses pembangunan manusia di provinsi papua berjalan secara berkelanjutan. Mengalokasikan belanja rutin dan belanja modal dengan sebijak mungkin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

Peneliti selanjutnya mungkin dapat menggunakan data belanja daerah dengan lebih spesifik yang terkait langsung dengan indeks pembangunan manusia seperti belanja kesehatan, belanja pendidikan dan belanja infrastruktur. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan data terbaru tahun 2018 guna memperoleh gambaran terbaru mengenai perkembangan kualitas pembangunan manusia di provinsi papua. Memperluas tentang waktu penelitian sehingga di harapkan lebih mampu melakukan generalisasi pada hasil penelitian.

REFERENSI

- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52, 93–108. [https://doi.org/10.1016/S0094-1190\(02\)00018-9](https://doi.org/10.1016/S0094-1190(02)00018-9)
- Amagoh, F., & Amin, A. A. (2012). An Examination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth. *International Journal of Business Administration*, 3(6), 72–81. <https://doi.org/10.5430/ijba.v3n6p72>
- Artaningtyas, W. D., Syariudin, A., & Maryani, T. (2012). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Buletin Ekonomi Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 51–58. <http://eprints.upnyk.ac.id/18140/>
- Badrudin, R., & Khasanah, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 9(1), 23–30.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Bodman, P., Hodge, Heaton, K.-A., & Andrew. (2009). Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. *Macroeconomic Research Group, Series* 350, 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/6487362.pdf>
- Delavallade, C. (2006). Corruption and distribution of public spending in developing countries. *Journal of Economics and Finance*, 30, 222–239. <https://doi.org/10.1007/BF02761488>
- Dewi, I. G. A. A. A., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 695–722. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/14706/11936/>
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth:

- Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), 1-13. https://www.bzu.edu.pk/PJSS/Vol31No12011/Final_PJSS-31-1-01.pdf
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23 (edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 96.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge In Society. *The American Economic Review*, 35(4), 519-530. <https://www.jstor.org/stable/1809376?seq=1>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-15. <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.474>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance : a study in public economy*. New York : McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Edward Elgar Publishing, number 14708. <https://ideas.repec.org/b/elg/eebook/14708.html>
- Rahyuda, K. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Denpasar: Penerbit Udayana University Press.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1-12. <https://media.neliti.com/media/publications/25077-ID-pengaruh-belanja-pemerintah-daerah-dan-pendapatan-perkapita-terhadap-indeks-pemb.pdf>
- Setiawan, A. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian. Metode Penelitian*.
- Suhardjanto, D., & Miranti, L. (2009). Indonesian environmental reporting index dan karakteristik perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 13(1). <https://103.220.113.195/JAAI/article/view/2240>
- Sumiyati, E. E. (2015). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani .Bandung.
- Suryarini, T. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Teory Disekitar Publik. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 207-216.
- Tirtosuharto, D. (2010). The impact of fiscal decentralization and state allocative efficiency on regional growth in Indonesia. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 1(2), 287-307. <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793993310000160>
- Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada IPM. *E-Jurnal*

- Akuntansi Universitas Udayana*, 12(3), 546-565.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11508>
- Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, A. A. N. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(3), 567-584.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6379>
- Yusuf, N. A. F., & Gunanto, E. Y. A. (2014). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta*. <http://eprints.undip.ac.id/43109/>
- Zebua, W. F., & Adib, N. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1-18.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1491>